

REINVENTING PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Sugeng Hari Wisudo

PENDAHULUAN

Secara umum pembangunan perikanan tangkap di Indonesia sejak berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami beberapa kemajuan yang secara faktual dapat dirasakan bersama. Walaupun demikian, hingga kini hasil pembangunan sub-sektor ini belum memberikan kontribusi yang signifikan atau optimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Hal tersebut dapat terlihat jelas bila membandingkannya dengan hasil pembangunan perikanan tangkap di salah satu negara tetangga terdekat, yakni Thailand. Padahal, Indonesia memiliki sumberdaya perikanan laut yang jauh lebih besar dan kaya dibandingkan negara tersebut. Bahkan, ironisnya sub-sektor perikanan tangkap Indonesia justru masih berkutut dan disibukkan dengan masalah klasik yang sebenarnya telah lama dihadapi di masa lalu. Namun, akibat tidak pernah diselesaikan secara sistematis dan tuntas, menyebabkan masalah tersebut menjadi semakin kompleks dan meluas serta semakin sulit untuk ditanggulangi.

Masalah klasik yang dihadapi sub-sektor perikanan tangkap nasional, diantaranya adalah belum seimbangnya pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan laut Indonesia sesuai dengan daya dukungnya, keterbatasan kemampuan dan kemiskinan yang masih menjerat sebagian besar masyarakat nelayan Indonesia, struktur armada perikanan tangkap nasional masih sangat didominasi yaitu lebih dari 90% oleh usaha skala kecil, pemanfaatan fungsi pelabuhan perikanan yang belum optimum, masih maraknya aksi *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal), iklim usaha perikanan tangkap yang belum kondusif, dan masih minimnya dukungan dari sektor/sub-sektor lain terhadap pembangunan perikanan tangkap. Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya, yakni akibat tidak sistematis dan tuntasnya dalam mengatasi masalah klasik tersebut diatas, maka masalah yang ada tersebut menjadi meluas dan menimbulkan masalah baru lain yang merupakan turunan atau akibat akumulasi

masalah-masalah sebelumnya, seperti kurangnya bahan baku untuk industri pengolahan hasil perikanan nasional, impor ikan yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, rendahnya daya saing global dari produk perikanan, dan lain sebagainya.

Akibat masalah-masalah tersebut di atas, tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat atau Negara. Sebagai salah satu contoh akibat maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di perairan laut Indonesia, ditaksir sekitar 1 juta ton ikan dicuri armada perikanan asing setiap tahun. Bila dihargai dengan uang, maka sekitar 2 milyar dolar AS yang langsung hilang akibat kegiatan tersebut. Akan jauh lebih besar kerugian Negara bila diperhitungkan tenaga kerja yang tidak terserap, industri pengolahan ikan yang macet karena tidak ada bahan baku, serta deplesi sumberdaya ikan (Nikijuluw 2005).

Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, dapat diperkirakan bahwa pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap nasional selama ini masih terjadi *mis-management* atau penanganan yang kurang tepat, yang terjadi hampir di seluruh komponen atau aspek sistem perikanan tangkap, sehingga untuk mengatasinya tidak mungkin dapat dilakukan secara parsial saja. Oleh karena itu, perlu untuk mereinvensi (menemukan kembali) pembangunan perikanan tangkap nasional yang tepat agar mampu memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat dan bangsa Indonesia secara berkelanjutan.

PRINSIP PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Food Agriculture Organization/FAO (1995) dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) telah mengamanatkan bahwa pembangunan perikanan tangkap harus direncanakan dan dilakukan secara baik dan bertanggungjawab. Secara umum, makna perikanan tangkap bertanggungjawab adalah identik dengan melaksanakan pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Kemudian, Charles (2001) dalam paradigmanya tentang *Sustainable Fisheries System* menyatakan bahwa, pembangunan perikanan tangkap harus dilakukan secara berkelanjutan melalui akomodasi empat aspek keberlanjutan,